

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu oleh:

1. Sania Fitri Desinta (2025). Judul penelitian **“Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2025”**. Universitas Singaperbangsa Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi telah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program yang dinilai telah terlaksana dengan baik. Program PKH dinilai mampu membantu meringankan beban ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta didukung oleh koordinasi dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh koordinator dan pendamping PKH. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan beberapa kendala, yaitu sosialisasi yang masih lebih berfokus kepada KPM sehingga masyarakat umum belum memahami program secara menyeluruh, serta pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan yang masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan tujuan program. Dengan demikian, meskipun pelaksanaan PKH telah berjalan efektif, masih diperlukan peningkatan pada aspek sosialisasi dan pemantauan penggunaan bantuan agar manfaat program dapat lebih optimal.

2. Siti Rahmah (2024). Judul penelitian **“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan”**. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hakurung tergolong efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh yang sebagian besar telah terlaksana dengan baik. Program dinilai mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur serta didukung oleh strategi dan koordinasi yang baik. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan beberapa kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan karena masih terdapat keluarga yang sudah mampu tetapi tetap menerima PKH, penggunaan dana bantuan yang belum sesuai dengan tujuan program akibat kurangnya edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap petugas pelaksana. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pembaharuan data penerima bantuan perlu dilakukan secara berkala agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak. Dengan demikian, meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan efektif, masih diperlukan perbaikan dalam aspek ketepatan sasaran, peningkatan edukasi kepada KPM, dan optimalisasi kinerja pelaksana agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian

Konsep efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘Efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Sedangkan efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Menurut Mahmudi dalam (Muhammad Sawir, 2020:126) ‘Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Mardiasmo dalam (Joko, *et.al*, 2022:8) ‘Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Sondang P. Siagian dalam (Siahaan dan Pardede, 2022:91) ‘Efektivitas sebagai keberhasilan penerapan sasaran yang telah ditetapkan. Ini artinya jika hasilkegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Handoko dalam (Ekasari, 2020:20) ‘Efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dikatakan efektif jika dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas juga diartikan melakukan pekerjaan dengan benar.

Menurut Hidayat dalam (Lisa Angrayni dan Yusliati, 2018:13) ‘Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang ditunjukkan melalui kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang direncanakan. Efektivitas juga mencerminkan sejauh mana suatu kegiatan, program, atau organisasi mampu memberikan dampak atau hasil sesuai dengan tujuan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan atau kontribusi hasil terhadap sasaran yang ditetapkan, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

b. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas suatu program memang bukanlah suatu hal yang mudah, karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda tergantung pada siapa yang menilai dan juga

menafsirkannya. Tingkatan efektivitas juga dapat diukur dengan cara membuat perbandingan yang telah ditentukan oleh hasil yang telah dicapai. Namun, apabila suatu usaha atau hasil yang telah dilakukan tidaklah tepat, maka tidak tercapainya suatu tujuan dan sasaran yang telah diharapkan dan proses tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut S.P Siagian dalam (Takahepis, *et.al*, 2021:3-4), ukuran pencapaian suatu kegiatan dapat dinilai dari tingkat efektivitasnya, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Menurut Richard M. Streers dalam (Mudiana, 2024: 17-18)

Pengukuran efektivitas dapat dilihat berdasarkan:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari indikator, yaitu kurun waktu, pencapaian sasaran, akses dan dasar hukum.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran tahap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah di sepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. indikator integrasi terdiri dari, yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Indikator adaptasi terdiri dari, yaitu pelatihan, peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Menurut Campbell J.P dalam (Muhammad Sawir, 2020:127)

Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1) Keberhasilan Program

Dilihat dari pengetahuan terhadap program dan penerapan program yang dilakukan sehingga bisa tercapai tujuan yang telah ditentukan.

2) Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan suatu sasaran program harus mempertimbangkan target yang diharapkan dari suatu program serta mekanisme atau tahapan pengoperasian program.

3) Kepuasan Terhadap Program

Semakin berkualitas suatu program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima program semakin tinggi, dan dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal ini.

4) Tingkat *Input* dan *Output*

Tingkat masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dapat dilihat dari sarana dan prasarana pengelolaan program serta bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan. Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dilihat dari sejauh mana bentuk transparansi yang dilakukan dalam penerapan program serta penilaian tentang program tersebut.

Menurut Budiani dalam (Dedi Amrizal, *et.al*, 2018:59) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor yang mempengaruhi efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M Steers dalam (Nur Aina, *et.al* 2018:54-55) sebagai berikut:

- 1) Karakteristik Organisasi, pada umumnya organisasi teknologi terdiri dari organisasi. karakteristik struktur Struktur dan dalam organisasi berkaitan dengan hubungan sumber daya manusia, bagaimana menyusun orang-orang dalam organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan teknologi dalam hal ini adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.
- 2) Karakteristik lingkungan, faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu organisasi yaitu lingkungan, lingkungan dalam hal ini mencakup dua hal yaitu lingkungan *ektern* dan lingkungan *intern*. Lingkungan *Ekstern* yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Sedangkan lingkungan *intern* disebut juga iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja.
- 3) Karakteristik Pekerja, selain faktor organisasi, teknologi dan lingkungan yang mempengaruhi efektivitas, kontribusi nyata dalam keberhasilan organisasi terlihat dari pekerjaannya. Para

pekerja berinteraksi satu sama lain di lingkungannya dan membentuk struktur organisasi serta memanfaatkan teknologi organisasi. Karakteristik pekerja memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi dengan dua proses organisasi yang penting, yaitu rasa keterikatan terhadap prestasi kerja individual.

- 4) Kebijakan dan Praktek Manajemen, secara umum dalam kebijakan dan praktik manajemen lebih menunjukkan variasi gaya, kebijakan dan praktik kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam indikator ini setidaknya ada empat variabel yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu: Penyusunan tujuan strategis pemanfaatan sumber daya, proses komunikasi, pengambilan keputusan.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian

Program Keluarga Harapan dalam (Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan, 2021:22) adalah ‘Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH’. Program ini merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

b. Tujuan PKH

Program Keluarga Harapan atau PKH dalam (Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan, 2021:22) memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM

c. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dalam (Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2021:22-23). Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut:

1) Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Ibu Hamil/nifas/menyusui.

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

b) Anak Usia Dini.

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

2) Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak Usia Sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/Mi sederajat atau SMP/Mts sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

3) Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

a) Lanjut usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

b) Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

d. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

1) Hak KPM PKH

KPM PKH berhak mendapatkan:

a) Bantuan sosial PKH

b) Pendampingan sosial PKH

- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
- d) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2) Kewajiban KPM PKH

Kewajiban KPM PKH terdiri dari:

- a) Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan.
- b) Komponen Pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif.
- c) Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
- d) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.
- e) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

- f) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

e. Alur Pelaksanaan PKH

Proses pelaksanaan PKH dalam (Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2021:26-36) terdiri dari beberapa tahapan. Berikut alur pelaksanaan PKH:

1) Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, bencana sosial dan komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

2) Pertemuan Awal dan Validasi

Pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH. Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

- a) Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi
- b) Pelaksanaan Petemuan Awal dan Validasi

3) Penetapan KPM PKH

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH existing hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

4) Penyaluran Bantuan Sosial

a) Bentuk Bantuan Sosial

Bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang kepada seseorang, keluarga, atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

b) Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran Bantuan Sosial untuk penerima manfaat PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

c) Mekanisme Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:

(1) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial

- (2) Sosialisasi dan edukasi
- (3) Distribusi KKS kepada KPM
- (4) Proses penyaluran bantuan sosial KPM
- (5) Penarikan dana bantuan PKH
- (6) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH
- (7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- (8) Pemanfaatan bantuan sosial

5) Pemutakhiran Data

Maksud dan tujuan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.

6) Verifikasi Komitmen

- a) Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH mensyaratkan pemenuhan Kewajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial oleh KPM PKH. Untuk pemenuhan kewajiban tersebut pelaksanaan PKH harus memastikan seluruh anggota KPM terdaftar, hadir dan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- b) Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir dan mengakses fasilitas

kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

c) Pelaksanaan entri data verifikasi komitmen dilakukan oleh pendamping setiap bulan melalui aplikasi e-PKH untuk mencatat kehadiran seluruh anggota KPM pada setiap kunjungan ke layanan kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial.

d) Data hasil entri verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan.

7) Pendampingan

Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH.

Implementasi proses pendampingan tidak hanya berfokus pada pendampingan perorangan KPM PKH yang terkendala atau membutuhkan terhadap akses layanan, tetapi juga melalui pendampingan terhadap kelompok. Pendampingan terhadap kelompok KPM PKH dapat dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

8) Transformasi Kepesertaan

Kepesertaan penerimaan bantuan PKH selama enam tahun, setelah itu diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap KPM PKH dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial serta peningkatan status sosial ekonomi. Transformasi kepesertaan merupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi.

Pada kegiatan resertifikasi, KPM PKH kembali dilakukan pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya setelah KPM PKH memperoleh bantuan PKH selama kurun waktu tertentu. Pada tahun ke lima menjelang berakhirnya kepesertaan PKH enam tahun, KPM akan dilakukan resertifikasi. Hasil dari resertifikasi akan digunakan untuk menetapkan status akhir kepesertaan PKH yaitu graduasi atau transisi.

a) Transisi

Transisi adalah peserta PKH yang kondisinya masih memenuhi syarat PKH. Pada masa transisi peserta PKH tetap menerima bantuan selama 3 tahun dan wajib memenuhi kewajiban KPM PKH serta dipersiapkan untuk menerima program pengentasan kemiskinan lainnya.

b) Graduasi

Graduasi adalah peserta PKH yang memenuhi tiga syarat yaitu:

- (1) Masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH

- (2) Tidak miskin tetapi masih memenuhi memiliki syarat PKH
- (3) Tidak miskin dan tidak memenuhi syarat

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti secara logis dan sistematis.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada masyarakat miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Mengingat pentingnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), maka dalam penelitian ini memfokuskan pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut dari Budiani dalam (Dedi Amrizal, *et.al*, 2018:59) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar kerangka pemikiran berikut ini.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

